



**LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
BULAN JANUARI TAHUN 2026**



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak,S.H.,M.H
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo,S.Pd
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Otniel Elokpere, S.Pd.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II PEMBAHASAN	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan.....	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan.....	16
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si	17
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd).....	24
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)	26
BAB III PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

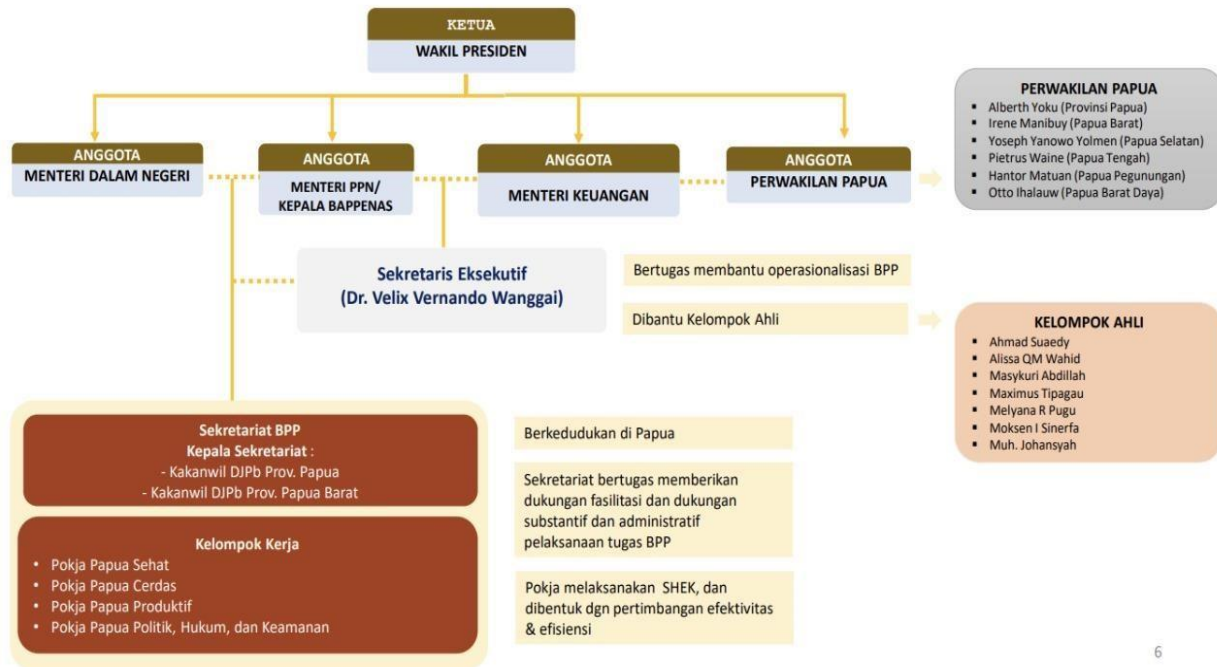
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



6

1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

- Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan koordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.


BAB II PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Bulan Januari tahun 2026 antara lain:

2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Hantor Matuan,S.IP.


Kegiatan 1	
Nama Kegiatan	: Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan turut mendampingi rangkaian kunjungan Wakil Presiden RI Ke Kabupaten Jayawijaya.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada 13 s.d. 14 Januari 2026, bertempat di Kabupaten Jayawijaya.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung kelancaran kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Provinsi Papua Pegunungan. • Melaksanakan fungsi BP3OKP/BPP dalam sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi kebijakan percepatan pembangunan. • Mengawal dan mengamati secara langsung pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). • Mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan UMKM berbasis lokal.
Peserta Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, beserta rombongan • Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Jayawijaya • Aparat TNI/Polri dan unsur pengamanan • Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya • Anggota BPP/BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan • Asosiasi Petani dan Pegiat Kopi Papua Pegunungan • Masyarakat dan pelaku UMKM
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: SHEK
Misi/Keterangan	: BP3OKP bersama Pokja Papua Sehat, Papua Produktif dan Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Kabupaten Jayawijaya berlangsung aman, tertib, dan lancar. • Wakil Presiden RI memperoleh gambaran langsung kondisi pembangunan daerah, khususnya pelaksanaan program MBG, UMKM kopi lokal, dan aktivitas pendidikan. • Keikutsertaan Anggota BPP/BP3OKP memperkuat peran lembaga dalam mengawal pelaksanaan kebijakan nasional di daerah Otonomi Khusus Papua.

		<ul style="list-style-type: none"> • Terjalin komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lokal
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya tindak lanjut hasil kunjungan Wakil Presiden RI melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. • Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua Pegunungan. • Dukungan berkelanjutan terhadap pengembangan UMKM lokal, khususnya sektor kopi Papua Pegunungan. • Peningkatan kesiapsiagaan dan pengamanan dalam setiap kunjungan pejabat negara di wilayah Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Audiensi Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan dengan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Kamis, 08 Januari 2026 bertempat di Ruang Kerja Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tugas Anggota BP3OKP dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi kebijakan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. • Menjalin komunikasi dan koordinasi awal antara BP3OKP dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. • Menyampaikan peran, tugas, fungsi, dan dasar hukum BP3OKP sesuai Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022. • Mendukung arah kebijakan dan terobosan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di berbagai sektor prioritas.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Hantor Matuan, S.IP – Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan • DR. HC. John Tabo, S.E., M.BA – Gubernur Provinsi Papua Pegunungan • Paul Wetipo, S.Pd – Anggota Pokja Papua Cerdas


		<ul style="list-style-type: none"> • Gaad Piranid Tabuni, S.P., M.M – Anggota Pokja Papua Sehat • Yoyo Iwik, S.Sos., M.Si – Anggota Pokja Papua Produktif
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP bersama Pokja
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya audiensi dan dialog konstruktif antara BP3OKP dan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. • Anggota BP3OKP menyampaikan apresiasi atas komitmen dan terobosan pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. • Gubernur menegaskan makna Otonomi Khusus sebagai ruang bagi Orang Asli Papua untuk memimpin dan membangun wilayahnya sendiri. • Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menetapkan fokus pembangunan pada pendidikan, kesehatan (rumah sehat), dan penguatan perekonomian Orang Asli Papua. • Disampaikan pentingnya pendataan Orang Asli Papua agar penyaluran Dana Otsus tepat sasaran, dengan target tersedianya data OAP yang valid pada tahun 2027. • Gubernur mengajak BP3OKP dan Pokja untuk bersama-sama mendorong Program Prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, serta menyampaikan tantangan implementasi di lapangan.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti hasil audiensi melalui koordinasi teknis antara BP3OKP, Pokja, dan perangkat daerah terkait. • Mendorong keterlibatan BP3OKP dalam perencanaan dan pengawalan program prioritas di Provinsi Papua Pegunungan. • Melakukan pertemuan lanjutan untuk pembahasan lebih teknis terkait implementasi program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat OAP. • Memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam percepatan pembangunan Provinsi Papua Pegunungan berbasis Otonomi Khusus.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama Analisis Papua Strategis (APS)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Januari 2026, bertempat di Kantor BPP Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti surat permohonan kunjungan dari Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan. • Membahas langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Provinsi Papua Pegunungan. • Memperkuat kolaborasi antara APS dan BP3OKP dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. • Mengidentifikasi pendekatan dan strategi bersama dalam penguatan pembangunan sektor prioritas.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Hantor Matuan, S.IP – Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan • Sonni Lokobal – Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan • Pengurus/Perwakilan APS Provinsi Papua Pegunungan • Staf/Perwakilan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dilaksanakan atas inisiatif APS sebagai bentuk dukungan terhadap peran BP3OKP dalam percepatan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan. • Ketua APS menyampaikan komitmen APS untuk mendukung dan mendorong BP3OKP, khususnya dalam penguatan kebijakan pembangunan berbasis Otonomi Khusus. • Agenda utama pertemuan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dan penguatan kebijakan Otonomi Khusus sesuai amanat Undang-Undang, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi Orang Asli Papua (OAP). 2. Penguatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Pembahasan langkah-langkah dan pendekatan strategis yang dapat dilakukan secara bersama oleh APS dan BP3OKP. 4. Pembahasan transparansi dan penguatan penyerapan anggaran Otonomi Khusus. • Anggota BP3OKP, Hantor Matuan, S.IP, mengapresiasi inisiatif APS dan menegaskan bahwa BP3OKP bukan

		<p>penguasa anggaran, melainkan memiliki fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disampaikan bahwa BP3OKP berperan membawa, mengarahkan, dan membantu Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dalam mengusulkan dan mengawal program strategis ke Bappenas dan kementerian/lembaga terkait.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya membangun pola kolaborasi berkelanjutan antara APS dan BP3OKP dalam penguatan kebijakan pembangunan Otsus. • Diperlukan penyelarasan program unggulan daerah dengan kebijakan nasional agar memperoleh dukungan pusat. • Transparansi dan efektivitas penyerapan anggaran Otsus perlu terus didorong melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan menutup Festival Sekolah Adat Hugulama ke-1 Tahun 2026.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 02–31 Januari 2026, bertempat di Yogomina, Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menghidupkan, mempertahankan, dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal (Hugula) melalui pendidikan berbasis adat. • Memperkuat peran Sekolah Adat sebagai bagian dari Program PKBM yang berpihak pada masyarakat tidak mampu. • Mengintegrasikan bahasa daerah dan nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan masyarakat. • Mendorong kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan pendidikan. • Menyiapkan generasi muda Papua Pegunungan yang berakar pada adat dan budaya lokal serta berdaya saing.

Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan • Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) • Direktur YPPK • Paroki Pugima • Tokoh adat dan masyarakat setempat • Dinas Pendidikan dan Dinas terkait (bahasa dan kebudayaan) • Pengelola dan pendidik Sekolah Adat Hugulama
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Disampaikan bahwa model Sekolah Adat telah berjalan di Sentani dan Tablanusu, yang menekankan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu serta penguatan nilai kearifan lokal. • Sekolah Adat Hugulama dikembangkan sebagai bagian dari Program PKBM, dengan kolaborasi Dinas Pendidikan dan Dinas terkait, khususnya dalam pengembangan muatan lokal bahasa daerah. • Tema kegiatan: “Membangun Pagar Kehidupan Kearifan Lokal (Hugula)”. • Sekolah adat dipandang sebagai wadah utama dalam menjaga, menghidupkan, dan mewariskan nilai adat, budaya, dan bahasa yang mulai tergerus. • Hantor Matuan, S.IP menegaskan pentingnya kolaborasi antara Sekolah Rakyat dan Sekolah Adat untuk memperkuat sistem pendidikan berbasis kearifan lokal, serta mendorong penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). • Disampaikan bahwa kegiatan ini murni merupakan inisiatif masyarakat adat, sehingga dukungan pemerintah diharapkan diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan fasilitas, bukan semata bantuan dana. • Bentuk dukungan yang diharapkan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan fasilitas sekolah dan ruang belajar ○ Perpustakaan dan museum sekolah adat ○ Bahan ajar berbasis budaya lokal • Yoyo Iwik, S.Sos., M.SI menegaskan bahwa pendidikan harus dibangun dengan pondasi adat, karena yang hilang bukan hanya bahasa, tetapi juga nilai, identitas, dan jati diri masyarakat. Hal ini sejalan dengan Program Papua Produktif, khususnya penguatan seni dan budaya lokal. • Penyelenggara kegiatan menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diintegrasikan di sekolah adat. <p>6. Data Pendidikan Masyarakat (Keterangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum sekolah: 40 orang • Tidak sekolah: 73 orang • Tidak tahu baca tulis: 127 orang


		<ul style="list-style-type: none"> • Tahu baca tulis: 79 orang • TK/PAUD: 2 orang • SD: 49 orang • SMP: 25 orang • SMA/SMK: 13 orang
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penguatan regulasi melalui Perdasus untuk perlindungan dan pengembangan Sekolah Adat. • Mengintegrasikan Sekolah Adat dengan program pendidikan nasional seperti Sekolah Rakyat dan MBG. • Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara BP3OKP, pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan masyarakat adat. • Mengembangkan fasilitas pendidikan berbasis budaya sebagai solusi keterbatasan kapasitas pengelolaan dana oleh masyarakat.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan dan Silaturahmi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) bersama Mata Garuda Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Jumat, 30 Januari 2026, bertempat di Kantor BPP Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin silaturahmi awal antara Mata Garuda Papua Pegunungan dan BP3OKP/BPP. • Membahas peluang kerja sama dan kolaborasi, khususnya dalam bidang pendidikan lanjutan (S2 dan S3). • Menyampaikan aspirasi dan gagasan berbasis data serta hasil survei sebagai bahan rekomendasi percepatan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan. • Mendorong upaya penjangkaran dan pendampingan calon penerima Beasiswa LPDP, baik dalam pemenuhan persyaratan administrasi maupun persiapan teknis seleksi.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota BP3OKP Provinsi Papua pegunungan bersama Pokja • Tim Mata Garuda Provinsi Papua Pegunungan

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP bersama Pokja Papua Sehat, Papua Produktif dan Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Mata Garuda Papua Pegunungan menyampaikan komitmennya untuk berperan aktif dalam pendampingan calon penerima Beasiswa LPDP jenjang S2 dan S3 sebagai bagian dari penguatan SDM Papua Pegunungan. • Pertemuan bersama BPP menjadi awal komunikasi dan silaturahmi yang diharapkan berkembang menjadi kerja sama dan kolaborasi berkelanjutan. • Aspirasi yang disampaikan oleh Mata Garuda diarahkan untuk dikembangkan berdasarkan data dan survei, sehingga dapat menjadi rekomendasi yang tepat sasaran bagi percepatan pembangunan di Papua Pegunungan. • Hantor Matuan, S.IP selaku Anggota BP3OKP menyampaikan bahwa BP3OKP dan BPP selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin melakukan koordinasi dan sinergi dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong kerja sama strategis antara Mata Garuda Papua Pegunungan dan BP3OKP/BPP dalam penguatan pendidikan lanjutan. • Mengembangkan program pendampingan Beasiswa LPDP berbasis kebutuhan daerah Papua Pegunungan. • Menjadikan hasil survei dan data Mata Garuda sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan SDM.
Dokumentasi Kegiatan	:	


2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Fransiscus Elosak, S.


Kegiatan 1	
Nama Kegiatan	: Koordinasi Pokja Papua Polhukam bersama Polres Jayawijaya mengenai permasalahan Kabupaten Lanny Jaya dan Yahukimo.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2026, bertempat di Polres Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Membahas permasalahan perang suku antar masyarakat kabupaten yahukimo dan lanny jayawa yang terjadi kurang lebih 2 bulan di kabupaten jayawijaya.
Peserta Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Pokja Papua Polhukam • Kasat Intel Polres Jayawijaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: Koordinasi
Misi/Keterangan	: Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	: Hasil koordinasi mediasi antar dua kubu sepakat berdamai Pada hari senin, 26 Januari 2026 bertempat di sinakma, Wamena, keluarga menyerahkan denda adat kepada pihak korban kedua dari masyarakat Lanny jaya berupa uang sebesar RP. 1.000.000.000 dan 30 ekor babi.
Rencana Tindaklanjut	: Membuat pernyataan yang disepakati bersama bahwa persoalan perang antar dua suku telah selesai dan tidak terulang Kembali.
Dokumentasi Kegiatan	: 

2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan
 Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan, Koordinasi dan Monitoring Koperasi Merah Putih di Distrik Walesi - Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Walesi - Jayawijaya pada tanggal 02 Januari 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Untuk memberi wadah usaha Bersama bagi masyarakat Kampung di Distrik Walesi agar dapat mengelola potensi ekonomi secara kolektif. • Untuk membentuk koperasi yang sah secara hukum, tertata, dan mampu dikelola secara professional dan berkelanjutan. • Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pihak luar dengan memaksimalkan sumber daya lokal (pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa). • Melalui koperasi, masyarakat lebih mudah mengakses simpan pinjam, Tabungan, serta layanan keuangan lainnya. • Koperasi menjadi sarana membuka usaha baru dan menyerap tenaga kerja lokal di Distrik Walesi. • Menjadi mitra pemerintah daerah dalam mempercepat Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pegunungan Papua.
Peserta Kegiatan	:	Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kampung 2. Ketua Koperasi 3. Anggota Koperasi
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya kepengurusan koperasi di Distrik Walesi secara musyawarah dan demokratis • Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang koperasi • Dukungan Lembaga keuangan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) • Penguatan peran koperasi sebagai ekonomi masyarakat lokal. • Fokus pada pemberdayaan masyarakat
Rencana Tindakanjnt	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan akan selalu di dorong/disupport, dimonitoring dan dikawal setiap 3 - 6 bulan sekali.


		<ul style="list-style-type: none"> • Program kegiatan ini kedepan akan dikoordinasikan atau dilaksanakan dengan Kementerian/Lembaga agar lebih aktif lagi. • Jika berkaitan dengan pelaku usaha, kegiatan ini akan selalu di laksanakan dan akan berkolaborasi dengan para pelaku usaha setiap ada kegiatan baik itu setiap bulan maupun dalam jangkan 1 tahun.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi, Monitoring Dan Audensi Program MBG Kepada Pendiri dan Pengelola Dapur SPPG Hetuma (Baru) Milik Yayasan Mitra Cendekia Waskita di Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Yayasan Mitra Cendekia Waskita pada tanggal 19 Januari 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengkoordinasikan dan memonitoring pelaksanaan Program MBG dan perluasan pendirian dapur SPPG di wilayah Provinsi Papua Pegunungan • Untuk menyinkronkan, mendorong dan membantu dalam konektivitas program MBG ke para instansi OPD terkait, penerima MBG, rekanan dan pelaku usaha ekonomi hasil pertanian dan peternakan.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Manager Yayasan • KA. SPPG • SPPI • Akuntansi • Ahli Gizi • Ast. Lapangan • Korwil Kabupaten • Karyawan Dapur • BP3OKP - Pokja Papua Produktif
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan monitoring kepada Kepala MBG Provinsi, Korwil dan Kepala SPPG setiap 2 bulan sekali dalam


		<p>pelaksanaan Program MBG dan perluasan pendirian Dapur SPPG di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyinkronkan, mendorong dan membantu untuk meringankan koneksitas kegiatan Program MBG kepada instansi OPD terkait, Penerima MBG, rekanan dan pelaku Usaha Ekonomi hasil pertanian dan peternakan. • Membantu, mengawal dan melaporkan hasil progres kegiatan Program MBG kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan akan selalu di dorong/disupport, dimonitoring dan dikawal setiap 3 - 6 bulan sekali. • Program kegiatan ini kedepan akan dikoordinasikan atau dilaksanakan dengan Kementrian/Lembaga agar lebih aktif lagi. • Jika berkaitan dengan pelaku usaha, kegiatan ini akan selalu di laksanakan dan akan berkolaborasi dengan para pelaku usaha setiap ada kegiatan baik itu setiap bulan maupun dalam jangkan 1 tahun.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan, Koordinasi dan Evaluasi Koperasi Aluama Hubulama dalam Mengelola Peralatan Mesin, Stock Kopi Pasca Panen, pemasaran dan ijin usaha oleh Bank Indonesia dan Dinas Tanaman Pangan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Koperasi Aluama Hubulama, Waga-Waga, Wamena pada tanggal 08 Januari 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<p>Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengkoordinasikan, menggerakkan dan mendorong para kelompok tani dan pelaku usaha kopi agar penanaman kopi kedepan harus diperluas/ekstensifikasi. • Untuk mengevaluasi dalam merevitalisasi/mengganti peralatan mesin pengolahan kopi model lama dengan yang baru dan modern.


		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menyinkronkan agar koperasi kedepan selalu menjaga stock harus aman baik kualitas maupun kuantitas. • Untuk membantu memonitoring dalam pemasaran baik lokal, luar Papua dan ekspor. • Untuk memastikan surat-surat ijin legalitas koperasi dan ketentuan hasil produk kopi sudah sesuai dengan atauran pemerintah. • Untuk membantu meningkatkan perekonomian anggota koperasi dan Masyarakat setempat.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Bank Indonesia Jayapura • KA. Biro Perekonomian Provinsi • Kadis Pertanian Provinsi (Diwakili Sekretaris) • Kadis Pertanian Kab. Jayawijaya • Kabid • Kadis • Ketua dan anggota koperasi • BP3OKP - Papua Produktif
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi untuk menggerakkan dan mendorong kepada para kelompok tani dan pelaku usaha kopi agar penanaman kopi kedepan harus diperluas/ekstensifikasi lahan. • Evaluasi agar segera merevitalisasi/mengganti mesin peralatan pengolahan kopi yang sudah model lama dan rusak untuk diganti yang lebih baru dan modern. • Sinkronkan agar stock bahan baku kopi selalu aman sesuai kualitas dan kuantitas. • Monitoring pemasaran yang harus dipertahankan baik, lokal, luar Papua dan ekspor. • Surat-surat legalitas koperasi dan hasil produk kopi harus aman dan ikuti sesuai aturan pemerintah. • Meningkatkan perekonomian anggota koperasi dan Masyarakat setempat.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan akan selalu di dorong/disupport, dimonitoring dan dikawal setiap 3 - 6 bulan sekali. • Program kegiatan ini kedepan akan dikoordinasikan atau dilaksanakan dengan Kementrian/Lembaga agar lebih aktif lagi. • Jika berkaitan dengan pelaku usaha, kegiatan ini akan selalu di laksanakan dan akan berkolaborasi dengan para pelaku usaha setiap ada kegiatan baik itu setiap bulan maupun dalam jangkan 1 tahun.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	---

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dan Audensi dengan Kadis Pertanian Tanaman Pangan mengenai Program Swasembada Pangan Tahun 2026 Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kantor BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 20 - 22 Januari 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<p>Adapun tujuan kegiatan ini sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyinkronkan dan memonitor program-program strategis di tahun 2026 sesuai rencana Aksi, RAPP dan RIPP. • Mengawal dan pengembangan pangan lokal. • Memonitor program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. • Meningkatkan dan mengembangkan pangan dengan program LP2B, KP2B, LCP2B Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	<p>Adapun peserta dalam kegiatan ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kadis Pertanian • Kepala Bidang • Kepala Seksi Perencanaan • Staff dan Ketua Kelompok Tani
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan output dan pondasi ekonomi yang positif dalam menekan kemiskinan ekstrim, penurunan inflasi dan menyukkseskan ketahanan pangan daerah. • Mengawali dengan kolaborasi dan Kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi pertanian dan penyediaan serta mengembangkan prasarana pertanian agar swasembada pangan bisa tercapai dengan baik.


Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan akan selalu di dorong/disupport, dimonitoring dan dikawal setiap 3 - 6 bulan sekali. • Program kegiatan ini kedepan akan dikoordinasikan atau dilaksanakan dengan Kementrian/Lembaga agar lebih aktif lagi. • Jika berkaitan dengan pelaku usaha, kegiatan ini akan elalu di laksanakan dan akan berkolaborasi dengan para pelaku usaha setiap ada kegiatan baik itu setiap bulan maupun dalam jangkan 1 tahun.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan dan Audensi Bersama Karo Perekonomian Mengenai Penyaluran Subsidi Beras di Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kepala Biro Perekonomian Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 29 Januari 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Adapun tujuan kegiatan ini sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengawal dan memonitor dalam pelaksanaan penggunaan subsidi agar sesuai dan tepat sasaran. • Mengontrol dalam pembayaran dan nilai jumlah penyaluran ke daerah setiap bulannya. • Memastikan dan membantu agar program subsidi bisa menstabilkan harga di tengah Masyarakat. • Mengawal agar subsidi tidak disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Peserta Kegiatan	:	Adapun peserta dalam kegiatan ini : <ul style="list-style-type: none"> • Karo Perekonomian • Bendahara PPK • Staff
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Adapun hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Memberi output bagi pemerintah Provinsi dalam menekan inflasi, harga beras dan ketahanan pangan daerah.

		<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi pemerintah pusat, daerah, bulog dan pihak penerbangan dalam Upaya menekan harga barang, menurunkan inflasi dan membantu Masyarakat bawah.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan akan selalu di dorong/disupport, dimonitoring dan dikawal setiap 3 - 6 bulan sekali. • Program kegiatan ini kedepan akan dikoordinasikan atau dilaksanakan dengan Kementrian/Lembaga agar lebih aktif lagi. • Jika berkaitan dengan pelaku usaha, kegiatan ini akan selalu di laksanakan dan akan berkolaborasi dengan para pelaku usaha setiap ada kegiatan baik itu setiap bulan maupun dalam jangkan 1 tahun.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan
 Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan dan Diskusi Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) serta Kunjungan Lokasi Pembangunan Global Training Center (GTC) Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Jumat, 16 Januari 2026, bertempat Kantor BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dan Lokasi Pembangunan Global Training Center (GTC) Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas konsep dan implementasi Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai bagian dari penguatan kebijakan pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan. • Melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Global Training Center (GTC) sebagai pusat pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. • Memperkuat sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi kebijakan pembangunan sektor pendidikan antara BP3OKP, Pokja Papua Cerdas, dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan • Pokja Papua Cerdas • Dr. Ir. Agus Irianto Sumule • Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya diskusi terkait Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai salah satu upaya strategis peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik di Papua Pegunungan. • Dilakukannya kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan Global Training Center (GTC) sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pusat pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. • Diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor serta dukungan kebijakan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan SSH dan percepatan pembangunan serta pemanfaatan GTC.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • BP3OKP melalui Pokja Papua Cerdas akan menindaklanjuti hasil diskusi dengan menyusun rekomendasi kebijakan terkait pengembangan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH). • Mendorong percepatan pembangunan dan pemanfaatan Global Training Center (GTC) melalui koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pihak terkait.


	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi program pendidikan strategis sebagai bagian dari penguatan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	: 

2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan
 Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)


Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Paparan Presentasi Kajian Master Plan dan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan ruang diskusi, masukan, dan saran dari peserta undangan terhadap dokumen Kajian Master Plan dan Studi Kelayakan RSUD Tipe B. • Melakukan koreksi dan penambahan substansi untuk memperkuat bobot dokumen kajian sebagai dasar perencanaan pembangunan RSUD Provinsi Papua Pegunungan. • Mempersiapkan dokumen agar siap dipresentasikan dan diseminarkan di tingkat nasional, khususnya di Kementerian Kesehatan.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Provinsi Papua Pegunungan • Pengarah BPP BP3OKP didampingi Pokja Papua Sehat dan Pokja Papua Cerdas • Wakil Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan • Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, serta Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (±15 orang) • Tim Kerja Penyusun Kajian Master Plan dan Studi Kelayakan RSUD (±8 orang)
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat dibuka dan ditutup secara resmi oleh Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. • Seluruh masukan, koreksi, dan saran dari peserta rapat diterima dan menjadi bagian dari penyempurnaan dokumen Kajian Master Plan dan Studi Kelayakan RSUD Tipe B. • Disepakati bahwa estimasi pembiayaan pembangunan RSUD Tipe B standar provinsi berada pada kisaran Rp 550 miliar lebih. • Gubernur mengarahkan secara khusus kepada BP3OKP untuk berperan aktif dalam mempercepat lobi dan dukungan ke Pemerintah Pusat terkait rencana pembangunan RSUD tersebut. • Kegiatan ditutup dengan jamuan makan bersama yang difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.

Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Tim penyusun melakukan finalisasi dokumen Kajian Master Plan dan Studi Kelayakan RSUD berdasarkan seluruh masukan dan koreksi hasil rapat. • Dokumen Kajian Master Plan dan Studi Kelayakan akan diseminarkan di Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari proses persetujuan dan penguatan kebijakan pusat. • BP3OKP, khususnya melalui Pokja Papua Sehat, berperan sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi dalam mempercepat koordinasi, advokasi, dan komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat guna mendukung percepatan realisasi pembangunan RSUD Tipe B Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Pembahasan Tunggakan Pembayaran Dana Kapitasi JKN
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Kamis 15 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat BPJS Cabang Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun koordinasi dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan. • Meminta dukungan BP3OKP dalam melakukan koordinasi dengan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan guna percepatan pembayaran dana kapitasi JKN yang telah melewati batas waktu pembayaran satu bulan (Januari 2026). • Mengantisipasi terhentinya pelayanan JKN bagi sekitar 21.000 penduduk akibat tunggakan pembayaran dana kapitasi.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarah BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan • Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, dan Pokja terkait lainnya • Staf Administrasi BP3OKP • Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayawijaya beserta 4 orang staf

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat berjalan dengan lancar dan konstruktif. • BP3OKP memahami secara menyeluruh hambatan yang dihadapi BPJS Kesehatan serta menjelaskan mekanisme pendekatan koordinatif yang dapat dilakukan. • Pelayanan BPJS Kesehatan di wilayah Papua Pegunungan pada umumnya berjalan cukup lancar, namun masih terdapat kendala berupa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Banyak penduduk yang belum memiliki kartu BPJS. ○ Sebagian masyarakat belum memiliki NIK KTP, sehingga menghambat proses administrasi pelayanan kesehatan. • Apabila tidak terdapat jaminan atau pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi terkait pembayaran dana kapitasi, maka pada akhir Januari 2026 BPJS Kesehatan berpotensi tidak mampu melanjutkan pembayaran layanan JKN bagi ±21.000 penduduk.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • BPJS Kesehatan segera menyiapkan dan menyerahkan data serta naskah kerja resmi terkait tunggakan dana kapitasi. • BP3OKP akan melakukan koordinasi intensif dengan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan melalui Sekda dan Staf Khusus Gubernur untuk mempercepat pertemuan sebelum Februari 2026. • Perlu penguatan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi dan kabupaten guna percepatan kepemilikan NIK bagi masyarakat
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Rapat rutin awal bulan BPP bersama Sekretariat
Pelaksanaan Kegiatan	:	Dilaksanakan pada Jumat, 09 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat KPPN Wamena

(Waktu & Lokasi)		
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan kebijakan Pemerintah Pusat tentang perubahan • Penganggaran dan Pembiayaan terhadap BP3OKP • Pengarahan Percepatan dan ketepatan Perencanaan dan Pelaporan kegiatan BP3OKP tahun kerja 2026 sesuai pedoman standart
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan • Sekretariat BPP Prov. Papua Pegunungan • 4 Pokja BP3OKP • Staf BP3OKP
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir Pembicara dan 7 peserta Rapat • Mendapatkan arahan dan memahami kebijakan pemerintah terhadap kinerja Tusi SHEK BP3OKP di 6 BPP se Tanah Papua • Diskusi dan Dialog difasilitasi oleh moderator berkompeten • Kesimpulan dan saran menjadi pedoman dalam bekerja
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kegiatan berdasarkan prioritan sasaran dengan pertimbangan pembiayaan • Rapat dan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala KPPN secara berkala terjadwal • Penjadwal kunjungan dan dan aksi Tusi SHEK
Dokumentasi Kegiatan	:	

BAB III PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

Wamena, 8 Februari 2025
BP3OKP
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN



HANTOR MATUAN, S.IP